

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan teori dan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 2 kesimpulan, yaitu :

1. Terdapat korelasi antara hak asasi manusia terutama hak ekonomi sosial dengan tindak pidana korupsi. Terutama korupsi yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat yang tercantum dalam ICESCR. Efek jangka panjang dari korupsi yang merenggut hak ekonomi dan sosial adalah terganggunya kesejahteraan masyarakat dan akhirnya negara juga sulit untuk maju.
2. Sampai saat ini, pedoman yang berlaku masih mencantumkan pasal tindak pidana korupsi tertentu saja. Padahal tindak pidana korupsi apapun memiliki peluang untuk melanggar hak asasi manusia terutama hak ekonomi sosial. Maka hakim dalam memutus tidak hanya melihat indikator yang tertulis seperti UUPTPK, UU HAM, pedoman dan lainnya tetapi juga melihat keadaan di masyarakat terutama masyarakat yang terenggut hak ekonomi dan sosialnya termasuk ketentuan yang ada dalam ICESCR.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan teori dan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disarankan bahwa :

1. Hak ekonomi dan sosial sebaiknya menjadi pertimbangan bagi hakim sebagai alasan pemberat bagi terdakwa. Selain itu, pedoman bagi hakim juga lebih baik wajib dipertimbangkan oleh hakim dan kerugian keuangan negara dimaknai lebih luas sampai hak ekonomi dan sosial masyarakat.
2. Hakim patut memepertimbangkan keadaan, jumlah, dan koruptornya itu sendiri sebagai pertimbangan lebih jauh lagi untuk menjathkan

vonis. Walaupun pertimbangan mengenai hal tersebut akan tergantung pada kasus atau kasuistis, namun patut dipertimbangkan terlebih jika berkaitan dengan hak ekonomi dan sosial masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

PAF Lamintang, "*DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*".

Prof. Philip Alston, Prof. Franz Magnis-Suseno dkk, "*Hak Asasi Manusia*".

### B. JURNAL / SKRIPSI

Andi Akhirah Khairunnisa. (2018). "*PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM OLEH PEMERINTAH DAERAH*", Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan), Vol.5, No.1.

Audrey R. Chapman, "*Indikator Dan Standar Untuk Pemantauan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*". Jurnal Hak Asasi Manusia 1 (1).

Dedi Afandi. (2008). "*Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM*". Jurnal ilmu Kedokteran, Jilid 2 Nomor 1.

Dedy Pudja Wardana. (2016). "*PENGARUH PEMBANGUNAN EKONOMI TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA DI KALIMANTAN TIMUR*", INOVASI : Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen, Volume 12, (2).

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Juli 2023, "*Laporan Hasil Tren Vonis 2022. Menurunnya Performa Mahkamah Agung*".

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Juli 2023, "*Laporan Hasil Tren Vonis 2022. Menurunnya Performa Mahkamah Agung*".

Eknando Andhonios joudy dan Heru Susetyo. (2024). "*Analisis Hak Asasi Manusia dalam Kejahatan Tindak Pidana Korupsi Bantuan*".

*Sosial Penanganan Covid-19 (Studi Kasus Korupsi Bantuan Sosial Penanganan Covid-19 Oleh Kementerian Sosial)*. UNES  
LAW REVIEW Vol. 6 No.3.

Elly Erawaty, “*UUD 1945 SEBAGAI SUMBER HUKUM EKONOMI*”,  
Revisi Mei 2022.

Fakultan Hukum UNPATTI. BAB III “*KEWAJIBAN PEMERINTAH  
INDONESIA DALAM PEMENUHAN HAM PEREMPUAN  
YANG BERSIFAT UNIVERSAL*”.

Frieska Kirana Dewi, Skripsi “*Pemenuhan Hak Kesehatan Dan Hak  
EKonomi Bagi Masyarakat Indonesia di era Pandemi Covid-19  
dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, (Bandung: Universitas  
Katolik Parahyangan, 2022).

M. Ilham Wira Pratama. (2019). “*Tindak Pidana korupsi Sebagai  
Pelanggaran Hak Asasi Manusia*”. Lex Renaissance No.1 VOL.4  
Maulana, “*Modul 2 Hukum Hak Asasi Manusia Materi 2 Prinsip Hak  
Asasi Manusia*”.

Media Neliti. (2006). “*Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*”.  
Volume 4 No.1

Nathania Martinesia, Skripsi “*TUMPANG TINDIH PASAL 5 AYAT 2  
DAN PASAL 12 HURUF a DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI*”, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2019).

Office of The United Nations High Commissioner For Human Rights.  
(2006). “*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ON A HUMAN  
RIGHTS-BASED APPROACH TO DEVELOPMENT  
COOPERATION*”.

- Perwiran Prya Pringgasakti dan Anita Zulfiani. (2024). *“Dampak Kasus BLBI terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia : Sebuah Tinjauan Kritis”*.
- Prof. Dr. Anne Peters, *“Corruption and Human Rights”*, BASEL INSTITUTE ON GOVERNANCE.
- Robby Darwis Nasution. (2013). *“KORUPSI DAN PELANGGARAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA DI INDONESIA”*, Jurnal Aristo Vol.1 No.2
- Temmanengga, *“IMPLEMENTASI KOVENAN HAK SIPIL DAN POLITIK DI INDONESIA”*
- United Nations Office on Drugs and Crime. *“Module 7 Corruption and Human Rights”*
- Wafda Vivid Izziyana. (2016). *“KORUPSI DALAM DIMENSI KEKUASAAN”*. Jurnal Law Pro Justitia vil. 1, No.2.
- Yusuf, H. M., ruhia Sabila, N., Nuladani, F. G., & Zaman, I. N. (2023). *“HAK ASASI MANUSIA (HAM)”*, Advances in Social Humanities Research, 1(5).

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN / PUTUSAN**

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- Kaidah Limburg dan Pedoman Maastricht.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Putusan Mahkamah Agung N0 1616K/Pid.Sus/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Kata “dapat” dan frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN JKT.Pst.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan..

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### **D. INTERNET / BERITA**

ADCO Law, “*Jenis-Jenis Delik dalam Hukum Pidana*”,  
<https://adcolaw.com/id/blog/jenis-jenis-delik-dalam-hukum-pidana/#:~:text=Pada%20delik%20materil%20adalah%20delik,dan%20338%20KUHP%20tentang%20pembunuhan.>

Ami Heppy, “*Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) Lembaga Antikorupsi Era Soekarno*”,  
<https://www.tribunnewswiki.com/2019/09/15/panitia-retooling- Aparatur-negara-paran-lembaga-antikorupsi-era-soekarno.>

Anadha Ridho Sulistya dan S. Dyan Andryanto, “*Somalia, Negara Paling Korup di Dunia Versi Transparency International*”,  
<https://dunia.tempo.co/read/1828607/somalia-negara-paling-korup-di-dunia-versi-transparency-international>

BBC Indonesia, “*Johnny G Plate divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi menara BTS 4G Kominfo*”,  
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxr17w4yrdvo#:~:text=Hakim%20juga%20menghukum%20Johnny%20membayar,ayat%201%20ke%20D1%20KUHP>.

BBC News Indonesia, “*Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara, korban masak bantuan tak layak – ‘Terpaksa kami olah, karena itu yang kami dapatkan’*”,  
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58301733>.

Berita Hukum Online, “*Dua Ahli Hukum Ini Bongkar Kelemahan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor*”,  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-ahli-hukum-ini-bongkar-kelemahan-pasal-2-dan-3-uu-tipikor-lt57330adb02c1b/?page=1>.

Bernadetha Aurelia Oktavira, “*Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*”,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>.

Boris Tampubolon, “*Affirmative Action (Diskriminasi Positif) dalam Penegaka HAM*”,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/iaffirmative-action-i-diskriminasi-positif-dalam-penegakan-ham-lt571f780f91d00/>.

Cicin Yulianti, “*Contoh Pelanggaran HAM Berat dan Ringan di Indonesia, Apa Saja?*”, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6882871/contoh-pelanggaran-ham-berat-dan-ringan-di-indonesia-apa-saja>

- Cicin Yulianti, “*Dana Bos: Pengertian, Penerima dan Jenisnya*”,  
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6575425/dana-bos-pengertian-penerima-dan-jenisnya>.
- CNN Indonesia, “*Hari Antikorupsi Sedunia, Studi Sebut Somalia Negara Paling Korup*”,  
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211209090817-127-731826/hari-antikorupsi-sedunia-studi-sebut-somalia-negara-paling-korup>
- CNN Indonesia, “*Kronologi BLBI hingga Tagihan Rp110, 45 T*”,  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210604155336-532-650470/kronologi-blbi-hingga-tagihan-rp11045-t>
- DPN SBMI, “*BELAJAR TENTANG HAK ASASI MANUSIA DARI HRWG*”, <https://sbmi.or.id/belajar-tentang-hak-asasi-manusia-dari-hrwg/>.
- Farid Achyadi Siregar, “*Korupsi Dana BOS rp 900 Juta, Eks Kepsek SMK 2 Kisaran Dituntut 7 Tahun Bui*”,  
<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6665228/korupsi-dana-bos-rp-900-juta-eks-kepsek-smk-2-kisaran-dituntut-7-tahun-bui/1>.
- Humas BPHN, “*Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun Lagi, Penegakan Hukum Tipikor Perlu Dikaji Ulang?*”,  
<https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031603084646/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-turun-lagi-penegakan-hukum-tipikor-perlu-dikaji-ulang#:~:text=Berdasarkan%20data%20Corruption%20Perception%20Index,terendah%20Indonesia%20sejak%20tahun%202015>.



Humas FH, “*Generasi Keempat HAM*”,  
<https://hukum.upnvj.ac.id/generasi-keempat-ham/>.

Indonesia Corruption Watch, “*Babak Baru Skandal BLBI*”,  
<https://antikorupsi.org/id/article/babak-baru-skandal-blbi>

*International Labour Organization*, “*KONSEP-KONSEP PENTING KESETARAAN DI TEMPAT KERJA*”,  
<https://www.ilo.org/id/media/286836/download>.

Khaerunisa, “*Fakta-Fakta Somalia, Negara Paling Korup di Dunia, Rakyatnya Hidup dalam Kemiskinan yang Parah!*”,  
<https://intisari.grid.id/read/032614178/fakta-fakta-somalia-negara-paling-korup-di-dunia-rakyatnya-hidup-dalam-kemiskinan-yang-parah?page=all>

KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA, “*Opsi terbaik Bagi Praktik Hukuman Mati di Indonesia*”,  
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/16/1675/opsi-terbaik-bagi-praktik-hukuman-mati-di-indonesia.html#:~:text=Namun%20Indonesia%20masih%20belum%20meratifikasi,Tindak%20Pidana%20Korupsi%20%20serta%20Narkotika>.

Latu Ratri Mubyarsah, “*Kejari Aceh tengah Sita Tanah Tersangka Korupsi Honor Guru Ngaji*”,  
<https://www.jawapos.com/kasuistika/01289652/kejari-aceh-tengah-sita-tanah-tersangka-korupsi-honor-guru-ngaji>.

Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Universitas Ktolik Parahyangan, “*Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana*” *Sopan Jadi Alasan Yang Meringankan?*,  
<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pertimbangan-hakim-dalam-perkara-pidana-sopan-jadi-alasan-yang-meringankan/>

- Mochamad Januar Rizki, “*Eks Mensos Juliari Divonis 12 Tahun Penjara dalam Perkara Bansos*”,  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/eks-mensos-juliari-divonis-12-tahun-penjara-dalam-perkara-bansos-lt61235675ad26b/>.
- Museum Kepresidenan, “*BAPEKAN, Kiprah Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam Mengawasi Aparatur Negara*”,  
<https://museumkepresidenan.id/artikel/bapekan-kiprah-sri-sultan-hamengkubuwono-ix-dalam-mengawasi-aparatur-negara/>.
- Nafiatul Munawaroh, “*Pengertian, Fungsi dan Tujuan APBN*”,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-fungsi-dan-tujuan-apbn-lt62359ad0f21e1/>
- Noor Faaizah, “*9 Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli, Dari Aktivis Barat-Perspektif Islam*”,  
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6975355/9-pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-dari-aktivis-barat-perspektif-islam>.
- Pusat Edukasi Antikorupsi, “*Kenali Bahayanya Dampak Korupsi di Berbagai Bidang ini*”, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220520-kenali-bahayanya-dampak-korupsi-di-berbagai-bidang-ini>
- Pusat Edukasi Antiorupsi, “*Mengenal Gratifikasi*”,  
<https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/website/mengenal-gratifikasi>.
- Rahmat Utomo dan Teuku Muhammad Valdy Arief, “*Korupsi Dana BOS Rp 954 Juta, Eks Kesek SMK di Sumut Divonis 6 Tahun Penjara*”,  
<https://medan.kompas.com/read/2023/05/09/130407878/korupsi-dana-bos-rp-954-juta-eks-kepsek-smk-di-sumut-divonis-6-tahun-penjara>.

Renata Christha Auli, “ *Jenis-Jenis Korupsi dan Hukumnya di Indonesia*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-korupsi-dan-aturannya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/>.

Renata Christha Auli, “*8 Prinsip dan Sifat Hak Asasi Manusia Beserta Penjelasannya*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-hak-asasi-manusia-lt62ff47f03be06/>.

Renata Christha Auli, “*Pengertian HAM menurut Para Ahli, Hukum Nasional dan Internasional*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ham-menurut-para-ahli-hukum-nasional-dan-internasional-lt6331716e60d8d/>.

Saufa Ata Taqiyya, “*3 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-kewajiban-pokok-negara-dalam-hukum-ham-internasional-lt62611e31941a4/>.

Silvia Ng, “*Eks Bupati Inragiri Hulu Dituntut 10 Tahun Bui Kasus Korupsi Rp 86 Triliun*”, <https://news.detik.com/berita/d-6554904/eks-bupati-indragiri-hulu-dituntut-10-tahun-bui-kasus-korupsi-rp-86-triliun>.

Sri Palupi, “*Hak Atas Standar Penghidupan Layak dalam Perspektif HAM*”, [https://smeru.or.id/sites/default/files/events/sri\\_palupi\\_-\\_hak\\_atas\\_standar\\_penghidupan\\_layak\\_dalam\\_perspektif\\_ham\\_.pdf](https://smeru.or.id/sites/default/files/events/sri_palupi_-_hak_atas_standar_penghidupan_layak_dalam_perspektif_ham_.pdf).

Transparency International, “Corruption Perception Index”.

Tri Purna Jaya dan Teuku Muhamad Valdy Arief, “*Korupsi Jalan nasional di Lampung Rugikan Negara Rp29,2 Miliar, 4 Tersangka Ditahan*”, <https://regional.kompas.com/read/2022/12/29/151210878/korups>

[i-jalan-nasional-di-lampung-rugikan-negara-rp-292-miliar-4-tersangka?page=all](https://regional.kompas.com/read/2022/12/29/151210878/korupsi-jalan-nasional-di-lampung-rugikan-negara-rp-292-miliar-4-tersangka?page=all).

Tri Purna Jaya dan Teuku Muhamad Valdy Arief, “*Korupsi Jalan nasional di Lampung Rugikan Negara Rp29,2 Miliar, 4 Tersangka Ditahan*”,  
<https://regional.kompas.com/read/2022/12/29/151210878/korupsi-jalan-nasional-di-lampung-rugikan-negara-rp-292-miliar-4-tersangka?page=all>

Tsarina Maharani dan Rakhmat Nur Hakim, 2021, “*Pukat UGM : Juliari Membuat Masyarakat Menderita..*”,  
<https://nasional.kompas.com/read/2021/08/24/14131871/pukat-ugm-juliari-membuat-masyarakat-menderita>.

Yayasan TIFA, “*10 Lembar Fakta Aspek Aspek Kesehatan Hak Atas Kesehatan*”,  
[https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?show\\_detail&id=2953#:~:text=Hak%20atas%20kesehatan%20Omeliputi%20hak,terhadap%20kesehatan%20ibu%20dan%20anak](https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?show_detail&id=2953#:~:text=Hak%20atas%20kesehatan%20Omeliputi%20hak,terhadap%20kesehatan%20ibu%20dan%20anak).

Yudi Pratama, “*Terpidana Korupsi Jalan Ir Sutami Sahroni Kembalikan Kerugian Negara 160 Juta*”,  
<https://kupastuntas.co/2023/08/09/terpidana-korupsi-jalan-ir-sutami-sahroni-kembalikan-kerugian-negara-160-juta>.

Yudi Pratama, “*Terpidana Korupsi Jalan Ir Sutami Sahroni Kembalikan Kerugian Negara 160 Juta*”,  
<https://kupastuntas.co/2023/08/09/terpidana-korupsi-jalan-ir-sutami-sahroni-kembalikan-kerugian-negara-160-juta>